



**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 45 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 37 TAHUN 2010  
TENTANG PENJABARAN **PERUBAHAN** ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan [Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang [Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah](#) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007](#), pergeseran antar rincian obyek dalam obyek belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, dan anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran tersebut harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pencairan dana Belanja Pegawai pada [Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Inspektorat, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kecamatan Bulu, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, Kelurahan Combongan, Kelurahan Sonorejo, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan](#), perlu merubah [Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2010](#) tentang [Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010](#);
  - c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas perlu merubah [Lampiran II Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2010](#) tentang [Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010](#);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan [Peraturan Bupati](#) tentang [Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2010](#) tentang [Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010](#);
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950](#) tentang [Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah](#);
  2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang [Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme](#) ([Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75](#), [Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851](#));
  3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang [Keuangan Negara](#) ([Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47](#), [Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286](#));

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 170) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran II untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah **Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Inspektorat, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kecamatan Bulu, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, Kelurahan Combongan, Kelurahan Sonorejo, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan**, diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 11 Desember 2010

**BUPATI SUKOHARJO,**

ttd

**WARDOYO WIJAYA**

Diundangkan di Sukoharjo  
Pada tanggal 11 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

**Ign. INDRA SURYA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2010 NOMOR 317**